



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: a. <b>Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara</b> b. <b>Forum Bersama Guru Honor (FGH) Jawa Barat</b> c. <b>Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional</b> d. <b>Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan</b> e. <b>Forum Bersama Guru Honor Kota Tasikmalaya</b>
Hari/Tanggal	: Selasa, 2 April 2024
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: <b>Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.</b>
Agenda	: 1. Penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan. 2. Lain-lain.
Hadir Komisi X DPR RI	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir	: 1. <b>Hasna, S.Pd.</b> (Ketua FGPPNS) Nusantara dan jajarannya. 2. <b>Rani Marlioni, S.Pd.</b> (Ketua Umum FGH) Jawa Barat dan jajarannya. 3. <b>Dewi Nurpuspitasari, M.Pd.</b> (Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional) dan jajarannya. 4. <b>M,Arief Arsyad</b> (Ketua FGNAPM) Sulawesi Selatan dan jajarannya. 5. <b>Neng Rohani, S.Pd.</b> (Ketua FBGH) Kota Tasikmalaya dan jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

RDPU Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.20WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari narasumber serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara, Forum Bersama Guru Honor (FGH) Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, dan Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya, yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasi sebagaimana terlampir dalam bahan paparan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan Guru PPPK tahun 2021 s/d 2024 sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai, kebijakan afirmasi bagi guru yang sudah mengabdikan minimal 5 tahun, kebijakan linieritas guru mata pelajaran, pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran bahasa asing (antara lain, bahasa Jerman), keterbukaan informasi tahapan pengangkatan PPPK sampai kepada penempatan termasuk ketersediaan anggarannya.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI secara berkala menyampaikan perkembangan tindak-lanjut rekomendasi Panja Formasi GTK PPPK dan Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN yang telah disampaikan pada bulan Juli 2021.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat menginisiasi rapat intensif dengan K/L terkait bersama Komisi X DPR RI, untuk membahas penyelesaian permasalahan guru PPPK.
5. Bahan paparan yang disampaikan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara, Forum Bersama Guru Honor (FGH) Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 12.59 WIB.

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**